Surakarta Accounting Review (SAREV)
Vol. 6 No. 1 Juni 2024
Penerbit : **Fakultas Ekonomi Universitas Surakarta**
ISSN Online: 2723-0511

PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS AKRUAL DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI SAIBA DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA KANTOR KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN

Sularsi[1)], Yanita Hendarti[2)]
[1), 2)]Fakultas Ekonomi, Universitas Surakarta
Email : sularsi8384@gmail.com[1)], yanitahendarti1974@gmail.com[2)]

Abstract

This research aims to determine the Accrual-Based Agency Accounting System Using the Saiba Application in Preparing Financial Reports at the Sragen District Prosecutor's Office, including the Components of the Agency Accounting System, namely starting from the source document verification process, Source Documents for the accounting system process at the UAKPA level, Input source documents which are used to be input into the Saiba Application as well as the steps taken in using the Saiba application so as to produce financial reports and the resources of the apparatus or employees in using the Saiba application. This research is descriptive qualitative research that leads to a case study at the Sragen District Prosecutor's Office. Data collection techniques by means of observation, interviews and documentation. The data analysis technique uses a descriptive qualitative approach. The results of research at the Sragen District Prosecutor's Office have been carried out based on PP 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards. The financial reports produced are LRA, Balance Sheet, LO and LPE, while the Notes to the financial reports (Calk) are prepared separately using Word or Excel after the process of preparing the financial reports in the Saiba Application is complete and can be accounted for. The absence of Cash Flow Reports and Budget Balance Reports is more because when income is received, everything is directly deposited into the State Treasury and there is no authority to manage the income (PNBP). The apparatus resources are also reliable enough so that all financial applications run can run well.

Keywords: ***SAIBA, Saiba Application, Apparatus Resources***

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah merupakan dasar bagi pemerintah untuk menyusun laporan keuangannya. Menurut Pasal 4 peraturan pemerintah ini, pemerintah menerapkan SAP berbasis akrual. SAP berbasis akrual tersebut dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Kemudian pada Pasal 7 peraturan pemerintah ini dijelaskan ahwa Penerapan SAP Berbasis Akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis

Kas Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kejaksaan Negeri Sragen adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Kejaksaan Negeri Sragen mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah- kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangannya telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. Laporan Keuangan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggung jawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kejaksaan Negeri Sragen.

Di samping itu, laporan keuangan juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Atas dasar latar belakang yang sudah peneliti paparkan diatas maka peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti tentang Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual dengan menggunakan Aplikasi SAIBA Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Kantor Kejaksaan Negeri Sragen.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual Dengan Menggunakan Aplikasi SAIBA Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Kantor Kejaksaan Negeri Sragen dan Apakah ada kendala dalam Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual Dengan Menggunakan Aplikasi SAIBA Dalam Penyusunan Laporan Pada Kantor Kejaksaan Negeri Sragen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual Dengan Menggunakan Aplikasi SAIBA Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Kantor Kejaksaan Negeri Sragen dan untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual Dengan Menggunakan Aplikasi SAIBA Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Kantor Kejaksaan Negeri Sragen.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Sistem dan Prosedur

Sistem merupakan jaringan prosedur yang silih berkaitan, berkumpul bersama-sama buat melaksanakan sesuatu aktivitas ataupun buat menggapai tujuan tertentu. Merupakan pendekatan sistem jaringan menekankan pekerjaan urutan prosedur pembedahan dalam sistem.

Pengertian Akuntansi

Pengertian akuntansi dari beberapa ahli adalah Menurut *Financial Accounting Standards Board* (FASB) adalah kegiatan jasa yang berfungsi menyediakan suatu informasi atau data kuantitatif yang kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi”(2017). Maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah sebuah kegiatan yang

berguna menghasilkan laporan keuangan yang dapat dianalisa untuk membuat keputusan yang tepat.

Pengertian Sistem Akuntansi Instansi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 Sistem Akuntansi Instansi yang selanjutnya disingkat SAI, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/ Lembaga.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi instansi adalah Serangkaian Prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dalam rangka menghasilkan informasi untuk menyusun neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

1. Komponen Sistem Akuntansi Instansi
   a. Proses verifikasi dokumen sumber
   b. Input dokumen sumber
   c. Verifikasi dan Posting data
   d. Pembuatan LRA, Neraca dan CALK
2. Rekonsiliasi

   Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data atau pencatatan yang terjadi di dua tempat yang berbeda.

Basis Akuntansi Pemerintahan

Basis akuntansi pada umumnya ada dua yaitu basis kas dan basis akrual. Namun terdapat modifikasi dari keduanya, yaitu basis kas dan basis akrual sama-sama digunakan dalam menyajikan laporan keuangan.

1. Basis Akuntansi Kas (*Cash Basis of Accounting*)
   Basis akuntansi kas (*Cash Basis of Accounting*) murni dimana pendapatan hanya diakui pada saat kas diterima dan beban hanya diakui pada saat kas dibayarkan.
2. Basis Akuntansi Akrual (*Accrual Basis of Accounting*)
   Basis akuntansi akrual (*accrual basis of accounting*) dimana pendapatan diakui pada saat dihasilkan dan beban diakui pada periode terjadinya, tanpa memperhatikan waktu penerimaan atau pembayaran kas.

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Menurut 225 /PMK.05/2016 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual yang selanjutnya disingkat SAP Berbasis Akrual adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA)

SAIBA merupakan aplikasi akuntansi pemerintah pusat yang dibuat dalam rangka menghasilkan laporan keuangan berbasis akrual.

Aplikasi SAIBA

Aplikasi SAIBA merupakan software yang dirancang sebagai sistem akuntansi keuangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Aplikasi SAIBA merupakan terobosan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi laporan keuangan sesuai SAP.

Kualitas Laporan Keuangan

Menurut PMK RI No. 59/PMK.06/2005 mendefinisiskan laporan keuangan dengan Laporan keuangan adalah bentuk pertanggung jawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Fungsi laporan keuangan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, dengan demikian keputusan yang diambil memiliki dasar yang kuat dan tegas untuk dilanjutkan dalam pengambilan keputusan selanjutnya.Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan untuk tujuan umumnya juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait.

Komponen Laporan Keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa komponen laporan keuangan Kementerian terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan

Komponen Kualitas Laporan Keuangan : Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, Dapat Dipahami. Beberapa kualitas penting informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan menurut SAP yaitu dapat dipahami (*understandability*), relevansi (*relevance*), keterandalan (*reliable*) dan dapat diperbandingkan (*comparibility*). Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh para pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.

Dasar Hukum Pelaporan Keuangan Pelaporan antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya bagian yang mengatur keuangan negara antara lain: Undang-Undang di bidang keuangan negara, Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah, Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, Peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan APBN/APBD dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.

Dalam laporan keuangan diperlukan sumber daya manusia yang berkompeten memiliki semangat tinggi dan menjunjung nilai-nilai sosial agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan terpercaya, Dengan adanya SDM yang berkomp eten dan memiliki pemahaman yang baik yang dapat menyajikan laporan keuangan dengan benar dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan.

Penelitian Terdahulu

Penelitian Muhammad Chaikal (2018) berjudul “Penggunaan Basis Akrual Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Watampone”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara teoritis, penelitian ini memberikan sebuah implikasi bahwa kondisi yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Bone saat ini dalam mengimplementasikan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual merupakan hal baru yang mana hampir setiap SKPD menjalankan ini karena bentuk ketaatan dan tanggung jawab mereka sebagai organisasi pemerintahan. masih terdapat kurangnya sumber daya manusia yang mengetahui atau menguasai secara penuh atau secara keseluruhan bagaimana teknik penyusunan laporan keuangan sesuai PP 71 tahun 2010 berbasis akrual ini dibuktikan dengan keterlambatannya pelaporan

keuangan tahun anggaran 2015.

Penelitian Mutmainna (2017) berjudul "Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Dengan Menggunakan Aplikasi Saiba Pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar" Penelitian ini menggunakan metode kualitatif . Hasil penelitian menunjukkan penerapan akuntasi berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi SAIBA pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar telah berjalan dengan baik sesuai dengan imbauan pemerintah dan kapasitas yang tersedia dan telah menerapkan dan melaksanakan standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual. Ini didukung juga selama mengoperasikan aplikasi basis akrual tersebut pegawai sub bagian keuangan tidak menemui kendala yang berarti.

Penelitian Fadilah Madjid (2016) berjudul "Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Di Pemerintah Daerah Kabupaten Maros". Penelitian ini menggunakan metode kuantitaf survei kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan akuntansi akrual di pemerintah daerah sudah sangat baik yang dipengaruhi oleh tingkat implementasi akuntansi akrual ketersediaan system informasi serta kualitas sumber daya manusia. Dan tidak ada pengaruh komitmen pelaksana dan pengembangan regulasi terhadap penerapan akuntansi akrual.

Penelitian Maslinda Paputungan (2018) berjudul "Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Di Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penerapan akuntansi berbasis akrual di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah berjalan secara efektif dan mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparasi pelaporan keuangan walaupun Kesiapan sumber daya manusianya dibidang akuntansi belum memadai dan perlu ditingkatkan lagi kemampuannya melalui penambahan SDM di bidang akuntansi dan pelatihan pelatihan.namun laporan keuangan bisa teratasi dengan jumlah pegawai yang seadanya.

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diantaranya dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadilah Madjid dan Fiko Ferdian Ismet adalah metode penelitiannya menggunakan kuantitatif. Perbedaan pada penelitian penelitian yang dilakukan diatas hampir semua dalam penerapan system akuntansi instansi berbasis akrual terkendala dalam Sumber daya manusianya baik dari segi kualitasnya segi pemahaman sistem tersebut dan kesiapannya dalam penerapannya. Hanya ada satu penelitian yang sudah Siap yaitu penelitian yang dilakukan oleh Penelitian Mutmainna dimana Hasil penelitian menunjukkan penerapan akuntasi berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi SAIBA pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar telah berjalan dengan baik sesuai dengan imbauan pemerintah dan kapasitas yang tersedia dan telah menerapkan dan melaksanakan standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual. Ini di dukung juga selama mengoperasikan aplikasi basis akrual tersebut pegawai sub bagian keuangan tidak menemui kendala yang berarti.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut :

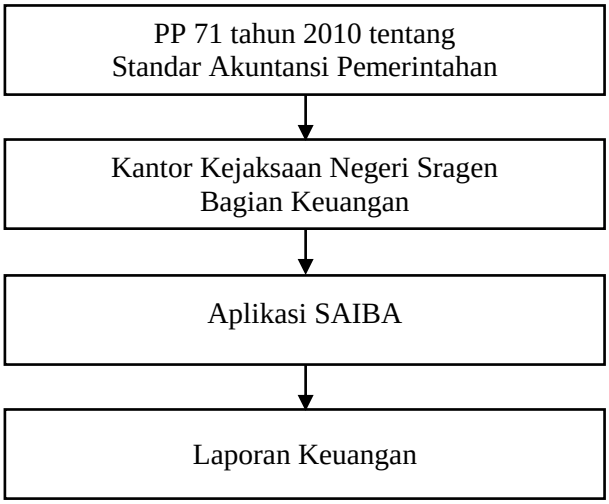

Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

Gambar di atas memberikan gambaran tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah metode kualitatif. Data kualitatif dapat berupa kata-kata, kalimat-kalimat atau narasi-narasi baik yang diperoleh dari wawancara, observasi mendalam maupun dokumentasi. Dimana lokasi penelitian adalah Kantor Kejaksaan Negeri Sragen yang beralamat di Jalan Raya Sukowati No. 23 Sragen, Kode Pos 57213. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh secara langsung dari instansi yang dijadikan studi kasus melalui teknik pengumpulan data. Sumber data sekunder yaitu suatu data yang diperoleh dari laporan, dokumen-dokumen, laporan hasil penelitian sebelumnya dan juga dari buku-buku tertulis lainnya yang berkaitan dengan judul yang diteliti. Dalam mengadakan pengumpulan data penelitian, penulis menggunakan teknik sebagai berikut Observasi, Wawancara, Dokumentasi. yang menjadi variabel penelitian adalah penyusunan laporan keuangan pada Kantor Kejaksaan Negeri Sragen. Definisi Operasional Variabel pada tahun 2010, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk meningkatkan kualitas pertanggung jawaban kinerja pemerintah. Perubahan yang sangat nyata dari SAP sebelumnya yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 adalah diwajibkannya penggunaan akuntansi berbasis akrual (*accrual*) oleh pemerintah, termasuk Kantor Kejaksaan Negeri Sragen. Uji Instrumen Penelitian meliputi uji validitas dimana untuk mengecek keabsahan penelitian ini teknik yang dipakai adalah perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, dan triangulasi. Uji reliabilitas data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah database dan uraian rinci (*thick description*). Secara teknik analisis data penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif pada pendekatan kualitatif atau analisa non statistic yang bersifat menggambarkan suatu kejadian sebagaimana adanya. Analisis kualitatif adalah suatu metode analisis denga n menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Analisa data dilakukan berdasarkan data-data yang telah diperoleh dilapangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisa dan dievaluasi dengan membandingkan dengan teori yang ada untuk menemukan kemungkinan adanya permasalahan atas sistem yang dimiliki oleh perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukannya wawancara mendalam dengan informan, peneliti menemukan informasi yang berkaitan dengan rumusan masalah, Aplikasi SAIBA adalah Aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Keuangan untuk digunakan sebagai aplikasi penyusunan laporan di Kementerian atau Lembaga pemerintahan, sedangkan di Satuan Kerja Kantor Kejaksaan Negeri Sragen Aplikasi SAIBA ini sudah di gunakan sejak 2015 sebagai aplikasi penunjang penyusunan laporan, dalam pelaksanaannya penyusunan laporan tidak hanya disusun oleh Aplikasi SAIBA namun adanya aplikasi-aplikasi lainnya yang menunjang dalam penyusunan laporan seperti Aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara) yang di operasikan oleh Petugas SIMAK-BMN, Aplikasi SAS (Sistem Akuntansi Satker) yang dioperasikan oleh Petugas KIPS, Aplikasi SILABI yang dioperasikan oleh Bendahara Pengeluaran dan Aplikasi Simponi PNBP (Sistem Informasi PNBP Online) yang dioperasikan oleh Bendahara Penerima, serta aplikasi online yang terintegrasi dan dimonitoring langsung oleh Kementerian Keuangan yaitu Aplikasi OM-SPAN (Online Monitoring-Sistem Perbendaharaan dan Anggaran) yang meghubungkan antara KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) dengan Satuan Kerja di Kementerian atau Lembaga. Laporan Keuangan dilaporkan dalam periode tertentu, dalam peraturan Kementerian Keuangan, Satuan Kerja harus melaporkan progres realisasi anggarannya dalam tiga waktu yaitu Per-bulan, Per-Semester dan Per-tahun, melalui Aplikasi SAIBA, Satuan Kerja melakukan rekonsiliasi internal, yaitu antar petugas keuangan yang bertanggung jawab pada aplikasi penunjang lain nya, dalam hal ini petugas SAIBA bertugas untuk melaporkan progres realisasinya dengan mengupload ADK (Arsip Data Komputer) ke Aplikasi online E-Rekon & LK (Elektronik Rekonsiliasi dan Laporan Keuangan) Kementerian Keuangan setiap bulan nya, sesuai keterangan petugas SAIBA di Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Sragen rekonsiliasi dilakukan pada awal bulan sebelum tanggal 10.

Pembahasan

Hasil penelitian ini dilihat dari proses pengoperasian aplikasi saiba dapat simpulkan bahwa Kejaksaan Negeri Sragen menggunakan Basis Akrual basis atau dasar akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat dan disajikan. Basis akrual (*accrual basis*) yaitu sebuah teknik pencatatan akuntansi, yang pencatatannya dilakukan saat terjadinya transaksi walaupun kas belum diterima. Dan laporan yang dihasilkan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, LO, LPE dan Calk.

Hasil penelitian ini dilihat dari kualitas laporan keuangan adalah melalui Aplikasi saiba proses penginputan dokumen sumber transaksi dan diposting kemudian menghasilkan laporan keuangan. Dalam rangka transparansi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) pada Kantor Kejaksaan Negeri Sragen yang bermanfaat bagi para pengguna.

Hasil penelitian ini dilihat dari Komponen Laporan Keuangan yang disajikan oleh Aplikasi Saiba pada Kantor Kejaksaan Negeri Sragen yaitu berupa Laporan Realisasi

Anggaran (LRA), Laporan Neraca, Laporan Operasional (LO)Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Calk (terpisah tersendiri dari aplikasi).

Hasil penelitan ini dilihat dari komponen kualitas laporan keuangan sudah Relevan data yang disajikan sudah sesuai dengan anggaran yang tercantum didalam DIPA dan dapat dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan yang berbentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Andal yaitu data yang dihasilkan itu sudah melalui verifikasi dari pihak KPPN kemudian diinput ke dalam aplikasi Saiba dan setelah itu dilakukan Rekonsiliasi. Aplikasi Saiba menghasilkan laporan keuangan yang otomatis terbentuk sehingga tidak bisa dimanipulasi. Dapat dibandingkan dimana laporan keuangan yang dihasilkan dari aplikasi saiba membentuk laporan keuangan yaitu tahun 2020 dan 2021 dapat digunakan sebagai pembanding antara laporan keuangan tahun ini dan tahun yang lalu.Dapat Dipahami dimana cara penggunaan aplikasi saibanya mudah karena disertakan dengan petunjuk dan modul serta sosialisasi dari KPPN dan data yang disajikan dapat dipahami karena langsung membentuk laporan keuangan sesuai dengan pos-pos yang tersedia.

Hasil penelitian ini dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan pada Kantor Kejaksaan Negeri Sragen yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.

Hasil penelitian menunjukkan pengoperasian apapun baik dari sumber daya aparaturnya dan sistem yang dikelola dan dioperasikan berjalan dengan baik dan sesuai yang ditargetkan ini dibuktikan perolehan Apresiasi Pelaksanaan Rekonsiliasi Tingkat UAKPA bulan Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh KPPN setempat. Yang menjadi kendala dalam perhitungan jurnal penyesuaian terutama dalam perhitungan piutang tak tertagih denda dan ongkos perkara tilang dan perhitungan penghapusan piutang tak tertagih yang tidak diambil dalam kurun waktu dua tahun terakhir yang harus dihitung manual harus berkoordinasi dengan bidang terkait yaitu bidang tindak pidana umum karena tidak muncul otomatis diaplikasi tidak seperti transaksi lainnya.

Dalam penyajian laporan keuangan terdapat petugas aplikasi yang memegang peran penting dalam pengoperasian aplikasi keuangan yaitu :

a. Petugas aplikasi Sas dan omspan oleh bendahara pengeluaran
b. Petugas aplikasi gpp oleh petugas PPABP
c. Petugas aplikasi Sas dan Simphoni oleh bendahara penerima
d. Petugas aplikasi Persediaan dan Aset tetap oleh Penyusun Laporan Keuangan
e. Petugas aplikasi Saiba oleh Penyusunan Laporan Keuangan
f. Petugas aplikasi epiutang oleh petugas perbidang pidum, pidsus dan datun.

Kerjasama sangat dibutuhkan dalam proses penyajian laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi saiba.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah :

1. Bahwa penerapan sistem akuntansi instansi berbasis akrual dengan menggunakan

aplikasi saiba dalam penyusunan laporan keuangan Pada Kantor Kejaksaan Negeri Sragen telah dilaksanakan berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

2. Aplikasi Saiba menggunakan basis akrual dan sudah terpenuhinya unsur basis akrual nya ketika semua biaya dan pendapatan diakui pada saat kas diterima / dikeluarkan.
3. Untuk Jurnal Penyesuaian harus diinput manual sedangkan buku besar sudah terbentuk otomatis melalui aplikasi Saiba.
4. Tujuan laporan keuangan sudah tercapai dengan dibuktikan setiap bulan melakukan rekonsiliasi dengan pihak KPPN setempat sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
5. Laporan Keuangan yang dihasilkan yaitu LRA, Neraca, LO dan LPE sedangkan Catatan atas laporan keuangan (Calk) disusun tersendiri memakai word atau exel setelah proses penyusunan laporan keuangan di Aplikasi Saiba selesai dan dapat dipertanggungjawabkan.
   Pada Kantor Kejaksaan Negeri Sragen tidak adanya Laporan Arus Kas dan Laporan saldo anggaran lebih dikarenakan ketika pendapatan diterima semua langsung disetorkan ke Kas Negara dan tidak memiliki kewenangan untuk mengelola hasil pendapatan (PNBP) tersebut.
6. Laporan Keuangan pada Kantor Kejaksaan Negeri Sragen yang dihasilkan dari aplikasi saiba telah memenuhi unsur dan syarat karakteristik kualitatif laporan keuangan yang meliputi relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami sehingga sesuai standar akuntansi pemerintahan PP 71 Tahun 2010.
7. Dasar Hukum Pelaporan Keuangannya sudah sesuai karena semua laporan keuangan mengacu pada aturan pemerintahan yaitu kementerian keuangan dan aturan – aturan yang dikeluarkan berupa Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Pemerintahan.
8. Sumber Daya Aparaturnya juga sudah cukup handal sehingga semua aplikasi keuangan yang dijalankan dapat berjalan dengan baik.

Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada halaman sebelumnya, maka saran yang dapat disampaikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Kejaksaan Negeri Sragen, untuk aplikasi saiba agar supaya ada update terbaru dalam perhitungan jurnal penyesuaian bisa menghasilkan data secara otomatis seperti transaksi lainnya dan tidak dihitung secara manual. Sehingga memudahkan petugas aplikasi saiba dalam menyajikan laporan keuangan.
2. Bagi pihak eksternal, karya tulis ini dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian sejenis yang nantinya akan bermanfaat bagi pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

Fadilah Madjid (2016). *Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Di Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maros).* Skripsi. Makassar: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.

Financial Accounting Standards Board (FASB).Jasa Akuntansi (*Accounting Services*) https://pakarakuntansi.com/portfolio/jasa-akuntansi-accounting-services/ Diakses tang-gal 15 Januari 2023. Pukul 21.00 WIB.

https://id.scribd.com/doc/133711778/Teori-Stewardship-Dalam-Akuntansi-Manajemen, Diakses tanggal 15 Januari 2023. Pukul 21.00 WIB.

https://www.anams.id/30-pengertian-sistem-menurut-para-ahli. Diakses tanggal 15 Januari 2023 Pukul 21.00 WIB.

https://www.mas-software.com/blog/pengertian-akuntansi-lengkap-menurut-ahli. Diakses tang-gal 15 Januari 2023 Pukul 21.00 WIB.

https://geysfahmiakbar.blogspot.com/2013/03/kerangka-dasar-penyusunan-dan-penyajian.html. Diakses tanggal 1 Februari 2023 Pukul 13.00 WIB.

https://www.kejaksaan.go.id/. Diakses tanggal 2 Februari 2023 Pukul. 16.00 WIB. https://kejari-sragen.kejaksaan.go.id/.Diakses tanggal 2 Februari 2023 Pukul. 16.00 WIB.

https://e-rekon-lk.kemenkeu.go.id/home/. Diakses tanggal 2 Februari 2023 Pukul. 16.00 WIB.

Muhammad Chaikal (2018). *Penggunaan Basis Akrual Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Watampone*. Skripsi. Makassar: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Mutmainna (2017). *Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Dengan Menggunakan Aplikasi Saiba Pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar*. Skripsi. Makassar: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Maslinda Paputungan (2018). *Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Di Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur*. Skripsi. Makassar: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Makassar.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara RI Tahun 2010, No. 123. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 27 Desember 2007. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 270/PMK.05/2014 tentang *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat*. 31 Desember 2014. Jakarta.